

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Kelancaran Berjalan Lintas Di Kabupaten Sorong

Welmince Ketrina Awom¹, Amiruddin², Arie Purnomo³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk Kelancaran Berjalan Lintas di Kabupaten Sorong; Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk Kelancaran Berjalan Lintas di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kepustakaan. Yang menjadi lokasi pada penelitian ini ialah Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur jalan memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap roda penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan membuka isolasi suatu wilayah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ialah kewenangan pemerintah distrik yang sangat terbatas; kemampuan keuangan (APBD) yang belum menjangkau; dan tuntutan ganti rugi tanah dan tanaman atas hak masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan untuk kelancaran berjalan lintas di kabupaten sorong memberikan dampak yang positif dan penting meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Kata Kunci : Infrastruktur Jalan, Berjalan Lintas, Kabupaten Sorong

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah merupakan salah satu cita-cita dari suatu negara untuk mencapai kemakmuran bagi penduduknya, dalam era pembangunan yang sedang berlangsung menuju titik terang tumpuan dan harapan rakyat. Bangsa yang sedang berkembang maka kini pemerintah Kabupaten Sorong sedang membangun disegala bidang, baik yang menyangkut pelaksanaan pembangunan infrastruktur peningkatan kesejahteraan masyarakat, berupa materil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan aparatur Pemerintahan adalah terwujudnya aparatur pemerintah Negara yang terbuka, inovatif dan peka terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat, pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang telah membawa peningkatan pada kualitas hidup masyarakat Indonesia sendiri. Kondisi tersebut telah mendorong keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat sehingga dengan situasi tersebut memungkinkan pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Terlebih lagi dalam era ekonomi daerah saat ini yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, otonomi daerah dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan, dengan adanya konsep otonomi daerah maka pemerintah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menentukan arahan kebijakan, khususnya mengenai rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada.

Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sarana dan prasarana pembangunan, melihat pelaksanaan kegiatan pembangunan baik itu banyaknya program rencana kegiatan pembangunan sampai dengan terbatasnya mengenai pendanaan. Maka pemerintah perlu melakukan penentuan skala prioritas berdasarkan urutan kepentingan serta melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

Penentuan program dan rencana pembangunan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu bentuk mekanisme perencanaan dari arus bawah atau (*bottom up planning*), peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah, selain itu dengan mengikut sertakan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hasilnya akan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Peran serta masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan daerah berdayaguna dan berhasil, sebaiknya pembangunan daerah yang baik dapat mendorong terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih berperan serta dalam pembangunan, melihat kondisi perekonomian masyarakat yang berangsur-angsur baik memungkinkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan, sementara itu pemerintah akan memfokuskan perannya pada pembinaan, pengaturan, perencanaan, dan pengawasan.

Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengurus daerahnya sendiri dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah dapat berupa, antara lain kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka seperti membayar pajak dan membayar retribusi pelayanan yang mereka terima; Kesiapan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah daerah seperti mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan, buang sampah pada tempat yang telah disediakan serta peraturan-peraturan lainnya; Kesiapan mereka untuk membangun lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana daerah; Kesiapan mereka untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik.

Sedangkan infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, prinsip ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya.

Ditinjau dari fungsinya infrastruktur dibedakan pula menjadi dua, yakni infrastruktur yang menghasilkan pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan. Jenis infrastruktur pertama pada umumnya dimanfaatkan sekelompok masyarakat tertentu dimana dengan fasilitas yang disediakan masyarakat penggunaannya dikenakan biaya, seperti air bersih, listrik, telepon, taman wisata dan sebagainya. Jenis infrastruktur kedua penyediaannya untuk

dinikmati masyarakat umum, seperti jalan raya , jembatan, saluran irigasi dan sebagainya. Sehingga penggunaannya tidak dikenakan biaya.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai akumulasi dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebelumnya yang meliputi barang yang dapat dilihat dan diraba misalnya : jalan raya, jembatan. Persediaan air bersih, dan lain-lain. Serta barang-barang tidak dapat diraba seperti tenaga kerja yang terlatih (terdidik) yang diciptakan oleh investasi modal sumber daya manusia.

Dan salah satu dinamika ekonomi yang secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab ialah pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam membuka transportasi untuk mencapai kepentingan guna sumber pendapatan daerah untuk memiliki dan mengurus daerahnya sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Kualitatif

Metode Kualitatif adalah metode penilitan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang diteliti, dan akan dibahas dalam penulisan ini maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Sorong. Permasalahan yang penulis ambil tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur termasuk dalam masalah jalan, bagaimana yang penulis ketahui tentang masalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu permasalahan yang hendak dicapai melalui pembangunan aparatur pemerintah dalam era otonomi daerah saat ini yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti yaitu “seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti disebut populasi atau universum yang paling sedikit mempunyai sikap yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, jadi besarnya sampel pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan beberapa persen sampel yang harus diambil dari populasi, oleh sebab itu besar atau kecilnya sampel tergantung pada masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data adalah melalui penelitian lapangan dan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah mengumpulkan data yang langsung dari tempat kejadian, dengan beberapa teknik dan cara-cara tertentu antara lain (1) Teknik wawancara (interview) adalah suatu pengumpulan data dengan jalan mengadakan percakapan dua responden yang diarahkan terhadap suatu masalah tertentu dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan dengan tatap muka atau berhadapan, antara penulis dengan responden diwawancarai antara lain (a) Kepala Dinas Perhubungan; (b) Dinas PU; (c) Dan masyarakat setempat. (2) Teknik observasi (pengamatan) adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objeknya mengenai pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong; (3) Teknik kepustakaan ialah suatu cara pengumpulan data dengan ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan bidang pemerintahan.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan untuk Kelancaran Berlalu Lintas di Kabupaten Sorong

Selama ini pembangunan infrastruktur menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, dan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang, dan infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi, persediaan prasarana perumahan dan permukiman antara lain, air minum dan sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah pentingnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama di Indonesia dan sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan, dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesejangan infrastruktur yang terjadi. Dalam konteks ini kedepan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan, pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah serta ketersediaan pengairan merupakan syarat kesuksesan pembangunan dan sektor-sektor lainnya.

Dalam hal penulis mengambil data secara interview (Wawancara) dengan Bapak Kepala Distrik dan Masyarakat setempat sebagai berikut Menurut Bapak Kepala Distrik Karel Gifelem, S.IP, tanggal 09 Oktober 2015 tentang pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastuktur jalan dalam membuka transportasi yaitu tentunya merupakan hal yang diakui secara positif, karena pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan adalah merupakan infrastruktur dasar karena pengaruhnya adalah sangat berdampak positif antara lain terhadap akses masyarakat umum, terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat terhadap kelancaran komunikasi antar kelurahan dengan distrik dengan perkotaan; Menurut Masyarakat tanggal 11 Oktober 2015 tentang pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam membuka transportasi, tentu sangat penting dan sangat berdampak positif, misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan merupakan roda penggerak dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga perekonomian masyarakat bisa terjamin atau terpenuhi.

Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Sorong tidak bisa beroperasi tanpa adanya transportasi untuk beraktivitas sehari-harinya, sehingga dengan adanya membuka transportasi di Kabupaten Sorong terutama di kelurahan dan masyarakat sangat senang, berkenaan dengan membuka transportasi di Kabupaten Sorong. Dalam upaya membuka transportasi antar kelurahan berupa angkutan darat sangatlah penting, terutama pada daerah yang terpencil seperti di distrik Kabupaten Sorong, karena angkutan darat disana sangatlah kurang sehingga perlu adanya untuk membuka transportasi.

Jalan dan jembatan merupakan komponen vital guna memperlancar distribusi barang atau jasa serta membuka daerah-daerah potensial dan terpencil hal ini sebagai indikator Bergeraknya roda perekonomian yang merupakan mata rantai pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan jalan dan jembatan yang diinginkan. Pembangunan sarana air bersih pedesaan telah mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih sehingga bagian dari program pembangunan infrastruktur pedesaan banyaknya lokasi dan kegiatan sarana dan prasarana air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tiap tahun anggaran namun kebutuhan akan sarana dan prasarana air bersih masih juga belum tuntas dan terus menjadi isu dan sepertinya sangat sulit untuk dipecahkan. Hal ini disebabkan adanya hambatan baik ditingkat perencanaan maupun pada pelaksanaannya kendala lain yang menjadi hambatan dalam pencapaian program ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun, sehingga sarana tersebut mengalami fungsi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang berbasis masyarakat, sehingga melibatkan masyarakat

yang lebih intensif diharapkan akan mengurangi tingginya tingkat fungsi sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun selain itu kondisi lingkungan yang buruk dapat berpengaruh pada potensi mata air itu sendiri. Hal ini diterangi dengan berkurangnya debit mata air secara perlahan tetapi pasti untuk itu melalui berbagai koordinasi dan program yang lebih luas penanganan air bersih telah melibatkan kegiatan konversi dan perlindungan sumber mata air itu sendiri.

Pembangunan bidang energi ketenaga listrikan melalui urusan energi dan sumber daya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan upaya kebutuhan listrik pedesaan (pada tingkat dusun) telah dilakukan kegiatan pengadaan jaringan listrik pedesaan di kabupaten sorong.

Dengan demikian di konklusifkan bahwa hasil kuisioner dari 30 responden diatas dapat dibuat dengan tabel berikut ini berdasarkan nilai dan pengukurannya.

No	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		SS	ST	RG	TS
1	Bagaimana dalam membuka transportasi antar kelurahan berupa angkutan darat	5 16 %	10 33 %	5 16 %	10 33 %
2	Bagaimana dalam upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah untuk membuka jalan dan jembatan	5 16 %	5 16 %	10 33 %	10 33 %
3	Bagaimana upaya pemerintah dalam pembangunan sarana air bersih	15 50 %	5 16 %	5 16 %	5 16 %
4	Bagaimana upaya pemerintah dalam membuka listrik pedesaan	10 33 %	10 33 %	5 16 %	5 16 %

Sumber data : di olah oleh peneliti

Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Untuk Membuka Transportasi Di Kabupaten Sorong

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Sistem transportasi yang ada di maksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan.dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan member stimulan kearah perkembangan disemua bidang kehidupan, baik pedangan,industri maupun sektor lainnya di daerah pedesaan. Transportasi sangat penting bagi daerah pedesaan sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang karena menyediakan akses bagi masyarakat kelurahan untuk memenuhi kebutuhan barang

dan jasa sehari-hari serta meningkatkan kehidupan social ekonomi, akses terhadap informasi, pasar, dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu. Serta peluang-peluang baru semuanya merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan.

Dengan dibangunnya sarana transportasi kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pedesaan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan, kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan ini akan berkembang apabila mempunyai prasana untuk pemasaran-pemasaran yang baik dan inovasi teknologi hanya bisa diperoleh apabila akses ke daerah tersebut baik. Faktor yang mempengaruhi adalah Kewenangan pemerintah distrik yang sangat terbatas; Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) yang belum menjangkau atau menjawab perencanaan atau rencana pembangunan distrik dan kelurahan yang diajukan atau diusulkan oleh pemerintah distrik; Tuntutan ganti rugi atas hak-hak masyarakat berupa tanah, tanaman, tumbuhan dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander, 2001, *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*, Penerbit Lapera Pustaka Utama Jakarta.
- Arikunto, Suhartini, 2002. *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. *Manajemen SDM Perusahaan*. Penerbit Remaja Rosdakarta, Bandung
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Penerbit Rafika Aditma, Bandung
- Cushway, Barry, 2006. *Human Resources Management*, Group Gramedia, Jakarta
- George .R. Terry dan Winardi, SE. 1986. *Asas-asas Manajemen*, Penerbit Alumni, Bandung
- Hasibuan Melayu S.P. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Penerbit CV. Haji Mas Agung, 1989.
- Handyaningrat, Soewamo. 1991. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*.
- Prof. Dr. Sadu Wasstiono, M.S. 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Penerbit Bandung
- Dr. Winarno Surachmad. 1995. *Penelitian Masalah*, Jakarta
- Selo Sumardjan & Karl Marx. 1962, *Tentang Pengertian Masyarakat*, Jakarta.
- Vina Dwi Laning & Endar wismulyani. 2009. *Masyarakat Sendi Dasar Kehidupan Bangsa*, Penerbit Surabaya.

<http://www.kesejahteraan sosial.com.id> Arthur Dunham & Dwi Hem Sukoco, 1991

<http://www.Pengantar Administrasi Pembangunan.com.id> Bintoro Tjokroamidjoyo, 1978,

<http://www.Pengertian Infrastruktur.com.id>, Grigg Tam Mart, 2008,

<http://www.Defenisi Infrastruktur Hudson.com.id> (1997)

<http://www.Pengertian Pembangunan dalam evolusi dan pengeseran makna pembangunan.com.id>, Kuncoro (2004)

Distrik Mayamuk (2009) dalam bukunya *Profit Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong*.

Permendagri No. 32 Tahun 2006, Tentang Pedoman Administrasi Negara

Pemendagri No. 30 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa